

BAB II

KONDISI MASYARAKAT JEPANG SEBELUM REFORMASI

Keberhasilan yang Jepang capai hingga saat ini menjadikannya sebagai negara yang dikagumi oleh banyak negara-negara lain. Perjalanan waktu yang dilalui pun tidaklah mudah dan banyak rintangan yang menghadang, salah satunya yaitu menjadi negara yang pernah jatuh dalam Perang Dunia II. Perkembangan Jepang yang berawal dari masyarakat feodal hingga menjadi masyarakat yang modern dan demokratis tentunya membutuhkan proses yang panjang serta keyakinan yang kuat. Namun, berkat jerih payah serta kerja keras yang dilakukan masyarakat Jepang, mereka menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan telah mencapai kemajuan yang besar. Oleh sebab itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk melahirkan sumber daya manusia yang dapat menjadi pilar untuk menopang kemajuan serta kesuksesan Jepang. Pada bab ini, penulis akan memaparkan kondisi masyarakat Jepang sebelum adanya reformasi yang dijadikan sebagai latar belakang diperlukannya upaya untuk pembangunan SDM Jepang.

2.1 Kondisi Masyarakat pada Era Edo

Sebelum memasuki era modern, Jepang pernah dikenal sebagai negara bakufu. Era Edo atau Edo Bakufu merupakan salah satu era yang menggunakan sistem bakufu di bawah pimpinan *Shogun Tokugawa*. Keshogunan *Tokugawa* (1603-1868) atau Keshogunan Edo merupakan pemerintahan berbasis militer feodalisme Jepang yang didirikan oleh *Tokugawa Ieyasu* dan dipimpin secara turun temurun oleh keluarga *Tokugawa* yang berlangsung selama 264 tahun (Nugroho, 2012:2). Diberi nama Era Edo karena pusat pemerintahan mereka saat itu berada di Kota Edo atau saat ini dikenal dengan Kota Tokyo.

2.1.1 Politik Isolasi (*Sakoku*)

Sakoku (鎖国) secara harfiah memiliki arti negara terkunci atau negara terantai. Politik Isolasi atau *Sakoku* merupakan kebijakan politik yang digunakan untuk menutup Jepang dari intervensi asing dalam segala bidang. Jepang pada saat itu juga memerintahkan masyarakatnya untuk tidak keluar

dari negaranya (Yusy Widarahesty, Rindu Ayu, 2011:46). Pada saat kepemimpinan *Toyotomi Hideyoshi* tahun 1573, Jepang sudah membuka hubungan dagang dengan negara luar (Nurhayati, 1987:21). Dampaknya, Jepang mendapatkan keuntungan terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan dalam negeri. Melalui perdagangan ini, Jepang menyambut para pedagang asing dengan membuka pelabuhan untuk kapal-kapal asing dan memberikan izin kepada kapal-kapal Jepang yang akan melakukan perdagangan di luar negeri. Melalui hubungan perdagangan antar negara ini, *Toyotomo Hideyoshi* bermaksud mengeksploitasi keuntungan untuk memperbaiki keuangan negara.

Setelah kepemimpinan Jepang berpindah ke *Tokugawa Ieyasu*, hubungan perdagangan antar negara pun masih dilanjutkan. Dikarenakan ia menyadari adanya keuntungan yang di dapat melalui hubungan perdagangan tersebut. Ia pun berharap dengan diberlakukannya hubungan ini, Jepang dapat mendistribusikan perdagangannya di mancanegara. Oleh sebab itu, jumlah surat izin yang diberikan sebagai tanda resmi untuk berlayar ke luar negeri semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, kapal-kapal asing yang berkunjung ke Jepang untuk melakukan transaksi perdagangan pun semakin meningkat.

Namun, kedatangan pedagang dan misionaris dari Portugis dan Spanyol yang membawa masuk kebudayaan Eropa dalam bentuk persenjataan hingga agama Kristen menimbulkan kecurigaan. Pemerintahan *Shogun Tokugawa* menganggapnya sebagai ancaman dalam penyatuan negara Jepang yang sudah dibangun dari awal pembentukan negara feodal, sehingga Jepang merasakan adanya dominasi dari negara-negara Eropa. Pada saat itu, masyarakat Jepang sangat berpegang teguh pada kepercayaan mereka yaitu agama shinto dan kebudayaan asli Jepang. Sedangkan, kebanyakan bangsa Eropa yang berkunjung membawa ajaran *gold, glory*, dan *gospel* yang dikhawatirkan akan menimbulkan kolonialisme dan imperialisme di Jepang baik secara agama, politik, maupun budaya. *Shogun*

Tokugawa pun menilai bahwa bangsa barat pun juga terlalu ikut campur dalam pemerintahan di negeri Jepang.

Kemudian kecurigaan tersebut dijadikan sebagai landasan untuk pemerintahan *Tokugawa* mengeluarkan kebijakan nasional yang berisikan melarang seluruh penduduk Jepang untuk keluar negeri dan bagi warga negara yang berada di luar negeri tidak diperbolehkan untuk kembali ke Jepang. Meskipun demikian, Jepang masih tetap menjadi hubungan dengan Cina dan Belanda. Jepang beranggapan bahwa kedua negara tersebut tidak memiliki hasrat untuk menyebarkan berbagai ideologi baru. Kebijakan inilah yang kemudian dikenal sebagai politik isolasi atau *sakoku*. Menurut shogun, politik isolasi yang dijalankan ini akan membawa bahaya dari luar Jepang yang mengancam kedudukannya.

2.1.2 Sistem Stratifikasi Kelas Sosial

Pada era ini, pemerintahan *Tokugawa* secara tegas menerapkan sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hal serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya (Indianto Muin dalam Binti Maunah, 2015:19-20).

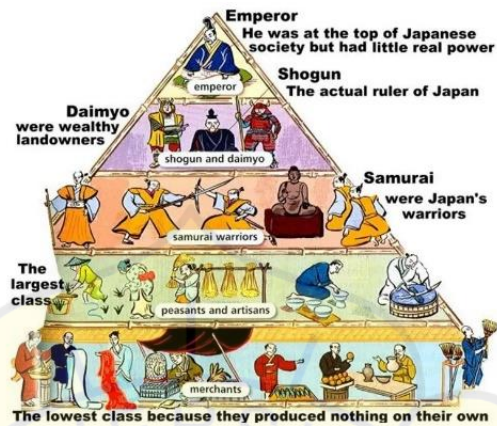
Ieyasu froze the social order, adapting Neo-Confucian China's four-class system—that is, scholar-officials (samurai), peasants, artisans, and merchants (Mikiso Hane, Louis G. Perez, 2009:17).

Terjemahan: Ieyasu membekukan tatanan sosial, beradaptasi dengan Neo-Konfusianisme Cina membagi kelas sosial menjadi empat, terdiri dari samurai, petani, pengrajin, dan pedagang.

Melalui pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa *Tokugawa Ieyasu* membagi susunan masyarakat Jepang menjadi empat pelapisan kelas sosial yaitu, kelas samurai atau militer (*bushi*), kelas petani (*nomin*), kelas

pengrajin (*kosakunin*), dan kelas pedagang (*shonin*). Empat pelapisan kelas sosial ini kemudian dikenal sebagai *Shinokosho*.

Gambar 1. Susunan Stratifikasi Sosial Jepang Era Edo



Sumber: : <https://bushidojo.wordpress.com/tag/shi-no-ko-sho/>

Sistem stratifikasi sosial ini awalnya dirancang oleh *Oda Nobunaga* dan *Toyotomi Hideyoshi*. Dikarenakan pada era feodal tingkat kejahatan dan pemberontakan sangat tinggi sehingga dirancanglah sistem tersebut dan kelompok militer atau samurai di tingkat atas guna mengatasi pemberontakan dan kejahatan yang ada. Golongan samurai adalah prajurit yang menjadi pengikut para shogun dan daimyo. Kaum samurai ini selain bekerja dibidang militer, mereka juga melakukan pekerjaan administrasi dalam pemerintahan bakufu dan daimyo.

Kemudian urutan teratas kedua setelah samurai adalah para petani. Para petani ini digunakan sebagai penopang hidup para pejabat pemerintah. Kebutuhan hidup mereka sangat bergantung pada pasokan beras dari petani. Namun kenyataannya, kaum petanilah yang paling menderita dibandingkan dengan kelas sosial lainnya. Dikarenakan hasil panen mereka harus disetorkan kepada para penguasa sebagai pajak. Sedangkan, hidup mereka sendiri begitu menderita.

Para pengrajin, pekerja, dan pedagang sebagian bertempat tinggal di kota. Jika dilihat dari susunan stratifikasi sosial, kedudukan mereka berada di bawah para samurai dan petani, Namun, pada kenyataannya jika dilihat dari segi ekonomi, mereka lebih sejahtera dibandingkan para samurai dan petani. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai *Sankinkotai*, yaitu kebijakan yang menetapkan bahwa para daimyo beserta anak dan istrinya harus menetap di kota Edo secara bergiliran dalam waktu satu tahun.

Keberadaan daimyo dan para samurai yang dijadikan pengawalnya pun menjadi suatu keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang dan pengrajin. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi baru mengenai pergantian sistem barter beras atau padi menjadi sistem pertukaran uang. Mereka memperoleh keuntungan besar dari hasil usahanya, sehingga kondisi kehidupan mereka mengalami peningkatan dan keberadaan mereka pun menjadi penting. Sementara itu, keadaan para samurai yang menjadi pengawal pada saat itu semakin buruk karena terlilit hutang dengan para pedagang. Keadaan para petani pun juga sama buruknya, dengan adanya pergantian sistem ekonomi menjadi sistem pertukaran uang, mereka semakin menderita dengan ditetapkannya pajak berupa uang yang jauh lebih memberatkan.

Tujuan diadakannya sistem stratifikasi sosial ini guna membantu pemerintah Jepang untuk menjaga serta mengontrol masyarakat secara ketat sehingga tidak terjadi pemberontakan. Pada awalnya sering terjadi pemberontakan karena mobilitas sosial yang sangat terbatas dan masyarakat tidak dapat berpindah kelas sehingga sistem ini berlaku secara turun temurun. Rakyat pun juga dilarang melakukan perkawinan campuran, sehingga terjadi diskriminasi sosial di dalam masyarakat. Meskipun demikian, Jepang menjadi lebih terkendali dan tingkat pemberontakan pun menurun.

2.1.3 Gagasan Masyarakat Keshogunan Tokugawa

Pada masa keshogunan Tokugawa, feodalisme berhasil diterapkan oleh pemerintahan Jepang. Hal tersebut ditandai dengan dibuatnya prinsip dasar negara yang digunakan sebagai pedoman hidup dikenal dengan *kokutai no hongu* (国体の本義). Prinsip ini menempatkan keturunan langsung dari Dewa *Amaterasu* sebagai kaisar penguasa negara (Abdul Irsan, 2017:47).

Selain itu, terdapat ajaran konfusianisme yang kemudian dijadikan ajaran dasar dalam konflik yang timbul baik secara politik dan sosial Jepang. Pada masa Tokugawa pemerintah Jepang memberlakukan doktrin keseimbangan yang bersumber dari ajaran konfusianisme, doktrin ini memberlakukan hal-hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara yang isinya antara lain (Murayama dalam Yusy Widarahesty, Rindu Ayu, 2011:52) :

- a) Rakyat harus bersedia berkorban demi kepentingan nasional.
- b) Posisi pemerintah lebih tinggi dari pada rakyat. Sehingga rakyat harus patuh dan mengikuti peraturan.
- c) Pemerintah adalah abdi masyarakat. Jika rakyat mengalami kesulitan dan perlu bantuan pemerintah, disampaikan secara langsung, jelas dan santun.
- d) Kebijakan pemerintah dibuat untuk menciptakan suasana pemerintahan yang harmonis, sehingga masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan kebijakan pemerintah.
- e) Doktrin kesetiaan tidak hanya dipatuhi dan berlaku bagi para samurai, pejabat dan pegawai pemerintah, tetapi bagi seluruh rakyat.

Ajaran tersebut kemudian menjadi landasan kesetiaan masyarakat Jepang terhadap pemerintahan. Pada akhirnya doktrin ini pun berperan dalam membentuk karakter masyarakat Jepang sehingga dapat membangun pertahanan diri dan efektif dalam menjaga kelangsungan pemerintahan Jepang. Doktrin tersebut juga menanamkan etika bushido yang terkandung nilai kesetiaan, rela berkorban, disiplin, jujur, dan pantang menyerah.

Confucianists were very much concerned with knowing one's place, honouring relationship, respecting order, and doing one's duty. Because of this values, Confucianism was revived and promoted by the Tokugawa shogunate. – Yamaga Soko (dalam Michelle Jessica. 2019:27)

Terjemahan: Konfusianis sangat perhatian terhadap tempat seseorang, menghormati hubungan, respek kepada aturan, dan taat melakukan tugas. Karena nilai-nilai ini, konfusianisme dibangkitkan dan dipromosikan oleh Keshogunan Tokugawa.

Melalui pernyataan di atas nilai-nilai bushido pun yang awalnya hanya dipegang oleh kaum samurai, pada akhirnya dikembangkan kembali dengan ajaran agama Buddha dan konfusianisme sehingga dijadikan landasan ke seluruh lapisan masyarakat pada masa Tokugawa.

Diharapkan dengan ajaran yang terkandung dalam etika bushido yaitu selaras dengan pengabdian tanpa pamrih, yang diketahui merupakan kewajiban tertinggi, yang menekankan kesetiaan serta ketaatan pada leluhur, orang tua, dan atasan. Pada masa isolasi ini, gagasan bushido sudah menjadi ajaran moral bagi seluruh rakyat Jepang. Shogun Tokugawa berharap hal tersebut dapat membentuk karakter bangsa Jepang melalui sistem feodal yang kuat sehingga dapat memudahkan pemerintahannya dalam memimpin Jepang.

2.1.4 Dampak Politik Isolasi (Sakoku)

Di masa politik isolasi (*sakoku*) berlangsung, Jepang berada dalam ketenangan dan kedamaian yang panjang. Kebijakan serta peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Tokugawa pada saat itu telah berperan dalam melahirkan pola pikir, budaya, nilai-nilai, dan gagasan bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang. Dikarenakan keputusannya untuk melakukan politik isolasi ini, Jepang tidak terpengaruh dengan gagasan-gagasan asing sehingga pemerintahan Jepang pun memperoleh keberhasilan dan membentuk identitas sebagai negara feodal yang kuat. Masa isolasi yang panjang tersebut juga telah memberikan pengaruh terhadap perilaku

masyarakat Jepang. Nilai-nilai kepatuhan dan rasa kesetiaan yang ditanamkan memicu rasa nasionalisme yang tinggi. Rasa nasionalisme masyarakat pun terbentuk berdasarkan rasa persamaan dalam ideologi, geografi, kerajaan, dan nilai-nilai yang dialami bersama. Sehingga masa isolasi panjang Jepang yang dialami hingga lebih dari 200 tahun ini memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter masyarakat Jepang.

Namun, kebijakan isolasi ini pun tidak hanya bersifat positif tetapi juga negatif. Adanya kebijakan ini pun, membuat Jepang menjadi tertinggal dari negara-negara barat. Dikarenakan pada saat Jepang sedang terisolasi dan terbelakang, negara barat telah maju dalam bidang industrialisasi. Perekonomian pun mengalami kekacauan dengan peraturan baru yang dibuat mengenai pergantian sistem barter menjadi sistem ekonomi uang (Suherman, 2004:204). Hal tersebut berpengaruh terhadap sistem sosial yang dijalankan juga pada saat itu, yaitu para petani. Kondisi inilah yang memicu para petani menjadi tidak suka terhadap kepemimpinan *Tokugawa* yang berlangsung pada saat itu.

Kemudian, adanya pertentangan mengenai ajaran Konfusianisme dalam masyarakat Jepang. Pemerintahan *Tokugawa* berharap dengan ajaran tersebut, masyarakat Jepang dapat tunduk dan setia terhadap kaisar dan mematuhi setiap keputusan yang dibuat. Namun, munculnya aliran *Shintoisme*, yakni aliran yang mempelajari sejarah dan agama nasional, bertentangan dengan ajaran Konfusianisme yang menampilkan anggapan bahwa kaisar merupakan keturunan dari Dewa Matahari. Oleh sebab itu, masyarakat Jepang mulai menyadari bahwa kehadiran kaisar harus dihormati dan ia pemegang kekuasaan tertinggi bukan shogun.

Melalui pernyataan tersebut, setiap kebijakan datang dengan sisi positif dan negatifnya masing-masing. Kebijakan isolasi ini telah melindungi dan memperkuat negara Jepang dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Namun, politik isolasi juga menutup potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dengan berbagai sistem dan doktrin yang dilakukan oleh Shogun *Tokugawa*,

sehingga masyarakat Jepang tidak dapat berkembang dan hanya terfokus pada aturan pemerintah.

2.2 Kondisi Masyarakat Awal Restorasi Meiji

Jepang yang menutup diri selama kurang lebih 250 tahun tidak menyadari bahwa negara-negara sekelilingnya telah memperoleh kemajuan khususnya dalam bidang industri. Setelah menyadari keteringgalannya, Jepang akhirnya memutuskan bergerak untuk mengembangkan diri dalam segala bidang. Gerakan perubahan tersebut akhirnya dikenal sebagai Restorasi Meiji, yang merupakan upaya Jepang untuk membangun kembali sistem pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya dengan mencontoh negara-negara Barat (Nurhayati, 1987:50).

Jepang pun mulai bergerak maju untuk mencapai visi dan misi mereka dalam memodernisasikan negara agar dapat setara dengan negara-negara barat di bawah kepemimpinan Kaisar Meiji. Hal yang dicapai oleh Jepang dalam restorasi tersebut adalah negara modern yang memiliki perindustrian, lembaga-lembaga politik, dan pola masyarakat yang modern. Oleh sebab itu, pemerintahan Meiji berupaya melakukan beberapa perubahan yang dalam Restorasi Meiji, khususnya pada pola pikir masyarakat yang menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia Jepang pada saat itu.

2.2.1 Penghapusan Sistem Stratifikasi Kelas Sosial

Setelah dilakukannya restorasi pada Era Meiji, Kaisar Meiji memutuskan untuk menghilangkan golongan-golongan sosial yang terbagi di dalam masyarakat pada masa feodal. Namun, dengan menghilangkan kelas sosial yang ada menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat Jepang. Masyarakat pun dibebaskan melakukan apa saja untuk kesenangan dan kepentingan diri sendiri mereka. Masyarakat pun terobsesi dengan ilmu pengetahuan dan pola hidup modern ala barat setelah ilmu pengetahuan modern masuk ke Jepang.

Menurut *Dohi Masataka*, berikut adalah daftar adat istiadat buruk masyarakat Jepang pada masa itu (Susy Ong, 2017:18-22):

- a) Tidak ada kekompakan antara masyarakat dengan pemerintah. Para petinggi negara menekan rakyat secara represif, sehingga rakyat menentang pemerintah. Padahal negara tidak bisa maju jika rakyat dan pemerintah tidak bekerja sama.
- b) Jepang pada saat itu sangat merendahkan perempuan. Suatu negara akan maju jika rakyatnya pandai, rakyat pandai karena memperoleh pendidikan yang baik, namun pendidikan yang baik bergantung pada peran ibu. *Napoleon*, *Washington*, dan *Mencius* menjadi tokoh besar berkat jasa ibu mereka. Sedangkan di Jepang, status sosial perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
- c) Rasa dengki dan iri kepada sesama anggota masyarakat sering terjadi, kecurangan merajalela, pejabat publik bertindak tidak adil, partai politik hanya mendukung calon dari partai sendiri, tanpa memedulikan kualitas calon tersebut, bahkan menyuap pemilih agar memilih calon dari parpol sendiri. Peraturan pemerintah berubah-ubah dalam waktu singkat sehingga rakyat kebingungan.
- d) Penganut agama Buddha, Kristen, dan *Shinto* rajin ke rumah ibadah untuk berdoa. Mereka dengan antusias memberikan sumbangan dan melakukan kegiatan untuk keperluan ibadah, namun tidak membayar pajak, uang sekolah anak-anak mereka, dan tidak memberikan sumbangan kepada fakir miskin. Banyak yang rela meninggalkan pekerjaan dan orang tua mereka demi ziarah ke tempat jauh, ada pula yang rela memutuskan hubungan keluarga demi masuk Kristen.
- e) Terobsesi dengan semua hal yang berbau barat tanpa menyaring terlebih dahulu. Seharusnya diadakan penyaringan, sehingga dapat memilah budaya apa saja yang bermanfaat untuk diterapkan dan mana yang tidak.
- f) Belum ada penyeragaman bahasa. Orang Jepang masing-masing daerah berbicara dalam dialek sesuai daerah asal mereka, sehingga menimbulkan kekacauan.

- g) Lemahnya mentalitas masyarakat. Mereka mau enaknja saja, bergantung pada pihak lain, tidak mau berusaha.
- h) Kurang ambisi, selalu mencari alasan supaya tidak perlu berusaha.
- i) Masyarakat tidak menghargai waktu, tidak menepati janji.
- j) Pemborosan gaya hidup meliputi sandang, pangan, papan, kehidupan sosial.
- k) Masyarakat suka banyak gengsi dan basa basi.
- l) Prostitusi dilegalkan oleh pemerintah, sehingga merusak keharmonisan rumah tangga dan menurunkan produktivitas serta menghambat kemajuan bangsa.

Menurut pemaparan di atas, setelah sistem stratifikasi kelas sosial dihilangkan, terjadi kekacauan di dalam masyarakat Jepang dikarenakan tidak adanya panutan untuk di contoh. Adat istiadat yang dipaparkan di atas pun tentunya menjadi nilai negatif dalam perubahan Jepang. Adat Istiadat adalah suatu cara atau kebiasaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah (Jalaludin Tunsam dalam Richa Dwi Novitasari, 2019:5). Sehingga dapat diketahui bahwa adat istiadat tersebut terbentuk dari kebiasaan masyarakat Jepang yang dilakukan secara berulang-ulang. Oleh sebab itu, jika Jepang ingin mengubah negaranya menjadi lebih maju, maka diperlukan perubahan sehingga pola pikir masyarakat Jepang dapat terbuka untuk lebih maju dan sumber daya manusianya dapat berkembang sesuai dengan hal yang ingin dicapai.

2.2.2 Budaya yang Belum Beradab dalam Pandangan Bangsa Barat

Jepang Jepang yang memutuskan untuk melakukan modernisasi akhirnya merombak sistem pemerintahan mereka dengan mengadopsi UU dari negara-negara Barat (Susy Ong, 2017:14). Sehingga di Jepang muncul fenomena yaitu demam Barat, di mana masyarakat Jepang terutama kaum urban pada saat itu sangat antusias untuk meniru gaya berpakaian, makanan, dan gaya rumah ala Barat sebagai wujud masyarakat modern. Namun,

karena masyarakat Jepang semakin marak meniru penampilan ala barat untuk dianggap beradab, hal tersebut malah terlihat tidak rasional. Sehingga upaya yang pemerintah lakukan untuk memperbaiki reputasi Jepang di dunia internasional diremehkan dan dicemoohkan.

Budaya tradisional Jepang seperti *Kabuki* dan *Sumo* pada saat itu tidak dianggap beradab dalam pandangan bangsa barat. Kabuki merupakan seni teater drama klasik khas Jepang yang dikenal dan berkembang pada Era Edo (Renariah, 2008:2). Namun, cerita yang dibawakan terlalu vulgar atau porno. Sedangkan, Sumo merupakan pertandingan gulat antar pesumo. Karena penampilan pesumo dapat dikatakan terbuka dan hampir terlanjang. Oleh sebab itu, budaya Jepang pun masih dianggap tidak beradab di padangan bangsa Barat.

Padangan tidak beradab yang diberikan oleh bangsa barat menjadikannya salah satu alasan diperlukannya perubahan kepada masyarakat Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan negara yang modern tidak dapat dilakukan dengan hanya meniru sistem negara barat saja, tetapi perlu ditanamkannya adat barat atau modern kepada masyarakat Jepang.

2.2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia Jepang yang Tidak Kompeten

a) Tidak Disiplin dan Tidak Menghargai Waktu

Jepang yang pada saat itu sedang berusaha mengejar ketertinggalannya dengan melakukan upaya perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern menyadari bahwa penyebab utama ketertinggalannya adalah SDM yang tidak kompeten. Terdapat syarat yang diperlukan untuk menjadi kan suatu masyarakat menjadi modern yaitu disiplin, tepat waktu, dan bekerja dengan efisien (Susy Ong, 2017:118).

Disiplin merupakan perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus (*Thomas Gordon*, 1996:3). Namun, keadaan masyarakat Jepang pada era ini bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut, karena kehidupan mereka masih tradisional dan sederhana. Hal tersebut didukung dengan pernyataan oleh *Kattendijke* yang mengatakan

bahwa pada saat itu masyarakat Jepang benar-benar santai, cuek, dan tidak pernah menepati janji (Susy Ong, 2017:117). *Hashimoto Takehiko* dan *Kuriyama Shigehisa* pun berpendapat bahwa karyawan kantor di perusahaan Jepang pada saat pagi masuk kerja, mereka berbincang-bincang dulu dengan sesama rekan kerja, merokok, pergi ke toilet, menerima tamu, atau mondar-mandir di ruang kantor yang menjadikannya sama sekali tidak efisien (Susy Ong, 2017:117). Melalui kedua pernyataan tersebut bahwa budaya disiplin Jepang yang terkenal dengan citra etos kerja saat ini sangat bertolak belakang pada waktu itu. Sehingga, masyarakat Jepang saat itu belum dapat dikatakan sebagai masyarakat modern karena belum memenuhi persyaratan tersebut.

b) Lemahnya produktivitas dalam sektor industri.

Semakin berkembangnya zaman, persaingan antar negara pun menciptakan adanya kompetisi untuk menciptakan suatu produk yang sesuai dengan permintaan. Oleh sebab itu, Jepang pun memutuskan untuk berpindah dari negara agraria menjadi negara industri. Pada tahun 1895 saat memperoleh kemenangan dalam perang dengan Tiongkok, Jepang membuka perdagangan di beberapa kota dan pelabuhan pesisir pantai timur Tiongkok. Namun, sebagaimana dialami oleh semua negara, tahap awal industrialisasi pasti ditandai dengan masalah rendahnya kualitas SDM, efisiensi, dan kemampuan teknologi, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif dalam hal kualitas dan harga (Susy Ong, 2017:120). Melalui pernyataan tersebut, Jepang menyadari bahwa terdapat kelemahan dalam kemampuan teknologi dan kualitas SDM yang mempengaruhi lemahnya produktivitas industri sehingga tidak dapat bersaing dengan negara lain. Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien (Indrayani, 2012:50). Sehingga, untuk memperoleh produktivitas industri yang tinggi, Jepang perlu meningkatkan kualitas SDM dan dapat dimanfaatkan secara efisien.